

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perkembangan Variabel Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat upah minimum (UMP), inflasi, dan tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013–2023. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan setiap variabel dari tahun ke tahun dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran.

##### **5.1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran**

Pengangguran adalah salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi. (Menurut Nanga, 2005:249), pengangguran terjadi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. (Putong, 2009:256) juga menjelaskan bahwa pengangguran muncul karena jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena angkatan kerja yang tidak produktif tidak berkontribusi pada perekonomian.

Dalam penelitian ini, tingkat pengangguran dianalisis pada lima provinsi yang berperan penting dalam perekonomian nasional, yaitu DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat, selama periode 2013 hingga 2023. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di kelima provinsi tersebut selama periode tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada periode 2013–2023 berada pada kisaran 5,28% hingga 7,07%. Adapun perkembangan TPT di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi menunjukkan pola yang beragam sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2013 hingga 2019, hampir seluruh provinsi mengalami tren penurunan angka pengangguran. Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan paling signifikan, dari

8,39% pada tahun 2013 menjadi 5,00% pada tahun 2019. Kondisi ini mencerminkan perbaikan situasi ketenagakerjaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Namun demikian, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan. Hampir seluruh provinsi mengalami lonjakan angka pengangguran yang tajam. DKI Jakarta mencatat peningkatan tertinggi hingga mencapai 10,95%, diikuti oleh Banten (10,64%), Jawa Barat (10,46%), dan Kepulauan Riau (10,12%). Sementara itu, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang hanya mengalami peningkatan relatif kecil, yaitu sebesar 6,88%.

Memasuki periode pemulihan pascapandemi, mulai tahun 2021 hingga 2023, setiap provinsi menunjukkan laju pemulihan yang berbeda-beda. DKI Jakarta dan Banten mampu menurunkan angka pengangguran dengan cukup cepat, sedangkan Kepulauan Riau mengalami proses pemulihan yang lebih lambat. Di sisi lain, Papua Barat menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan mencatat angka pengangguran terendah sebesar 5,10% pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Banten memiliki rata-rata TPT tertinggi selama periode penelitian, yakni sebesar 8,75%, disusul oleh Jawa Barat (8,55%), Kepulauan Riau (8,32%), DKI Jakarta (7,50%), dan Papua Barat dengan rata-rata terendah sebesar 7,22%.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Papua Barat memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap tekanan krisis ekonomi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, provinsi-provinsi di wilayah Jawa dan sekitarnya cenderung lebih rentan terhadap krisis, namun menunjukkan kemampuan pemulihan yang relatif lebih cepat. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh variasi dalam struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing provinsi. Adapun rincian Perkembangannya sebagaimana tergambar pada Tabel 5.1.1.

Tabel 5.1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8,39	9,78	9,95	8,37	9,33
2014	8,47	9,49	9,57	8,40	8,91
2015	6,73	8,64	7,71	8,89	9,28
2016	5,62	7,92	6,74	8,89	8,38
2017	6,08	8,52	6,61	8,22	7,58
2018	5,16	8,52	6,33	7,73	6,44
2019	5,00	8,11	6,21	7,82	5,82
2020	10,95	10,64	10,12	10,46	6,88
2021	10,48	9,86	9,91	9,82	6,14
2022	8,42	8,09	9,42	8,31	5,63
2023	7,87	7,72	8,98	7,57	5,10
<b>Rata-rata</b>	<b>7,50</b>	<b>8,75</b>	<b>8,32</b>	<b>8,55</b>	<b>7,22</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023, (Data Diolah)

### 5.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan peningkatan kemampuan daerah dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Secara teori, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tanda keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2012). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di lima provinsi selama tahun 2013-2023 menunjukkan trend yang berbeda-beda, terutama setelah adanya dampak besar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi berlangsung stabil hingga tahun 2019, lalu mengalami penurunan sebesar -4,39% pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian Jakarta pulih dengan cepat, ditandai oleh pertumbuhan 4,92% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,21% pada 2023. Pemulihan ini menunjukkan kekuatan

ekonomi Jakarta yang didukung oleh inflasi yang terkendali serta perkembangan sektor industri dan perdagangan. Adapun rincian Perkembangannya sebagaimana tergambar pada Tabel 5.1.2.

Tabel 5.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Di Lima Provinsi Tahun 2013-2023 (%)

<b>PDRB (Milyar Rupiah)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Banten</b>	<b>Kep. Riau</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Papua Barat</b>
2013	5.26	8.23	11.00	6.55	14.15
2014	5.20	5.03	2.62	5.68	7.66
2015	5.61	5.01	2.57	5.97	4.69
2016	5.15	4.92	2.18	5.77	3.51
2017	5.68	5.72	3.52	6.45	3.74
2018	5.85	6.09	3.78	6.99	5.74
2019	5.73	6.15	4.01	6.32	4.03
2020	-4.39	-4.67	-4.53	-4.54	-1.89
2021	4.92	6.37	4.62	7.34	2.31
2022	5.56	6.98	6.25	6.99	5.17
2023	5.21	6.62	6.37	6.57	5.44
<b>Rata-Rata</b>	<b>4,53</b>	<b>5,13</b>	<b>3,85</b>	<b>5,46</b>	<b>4,96</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)*

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) di lima provinsi selama tahun 2013-2023 menunjukkan trend yang berbeda-beda, terutama setelah adanya dampak besar dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Di Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi berlangsung stabil hingga tahun 2019, lalu mengalami penurunan sebesar -4,39% pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian Jakarta pulih dengan cepat, ditandai oleh pertumbuhan 4,92% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,21% pada 2023. Pemulihan ini menunjukkan kekuatan ekonomi Jakarta yang didukung oleh inflasi yang terkendali serta perkembangan sektor industri dan perdagangan.

Provinsi Banten juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -4,67%, kemudian, pertumbuhan kembali meningkat pada 2021 6,37% dan 6,62% pada 2023. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan investasi asing serta pertumbuhan

di sektor manufaktur dan ekspor. Kepulauan Riau, yang sempat turun -4,53% pada 2020, mencatat pemulihan bertahap dengan pertumbuhan sebesar 4,62% pada 2021 dan 6,37% pada 2023. Pemulihan di daerah ini berjalan lebih lambat karena sektor pariwisata yang terdampak cukup besar, meskipun sektor industri mulai berkembang kembali.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi besar mengalami penurunan ekonomi sebesar -4,54% pada 2020. Namun, pemulihan berlangsung cukup cepat, yaitu 7,34% pada 2021 dan 6,57% pada 2023. Pemulihan ini dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri dan meningkatnya kesempatan kerja, meskipun masalah pengangguran masih menjadi tantangan. Sementara itu, Papua Barat mencatat penurunan ekonomi paling kecil pada 2020 sebesar -1,89%. Pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya yaitu 2,31% (2021) dan 5,44% (2023) menunjukkan Pemulihan berlangsung lebih lambat, antara lain karena rendahnya nilai investasi dan tingginya ketergantungan pada sektor sumber daya alam.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 4,79%, dapat dilihat bahwa hanya Jawa Barat, Banten, dan Papua Barat yang pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata nasional. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau mencatat angka di bawah rata-rata nasional. Penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 terlihat berdampak besar di semua provinsi, terutama DKI Jakarta dan Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam. Namun, pada tahun-tahun setelahnya, sebagian besar provinsi mampu menunjukkan pemulihan yang konsisten, meskipun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi dan ketahanan regional memiliki peran penting dalam menghadapi krisis ekonomi nasional.

### **5.1.3 Perkembangan Tingkat Upah**

Upah memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut (Mankiw, 2006), upah merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan dalam kegiatan produksi. Upah Minimum Provinsi (UMP) terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, yang berfungsi sebagai perlindungan agar pekerja tidak menerima

upah di bawah standar. Penetapan UMP secara umum mempertimbangkan beberapa hal, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, dan kebutuhan hidup layak.

Berikut adalah perkembangan UMP lima provinsi selama tahun 2013–2023 yang telah dikonversi ke dalam satuan juta rupiah per bulan.

Tabel 5.1.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

<b>Upah Minimum Provinsi (Rupiah)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Banten</b>	<b>Kep. Riau</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Papua Barat</b>
2013	43.79	23.08	15.17	78.21	17.93
2014	10.91	3.91	11.98	10.07	11.11
2015	10.66	20.30	10.70	30.72	6.32
2016	14.81	9.38	11.11	12.50	13.86
2017	8.39	10.29	2.61	2.22	5.22
2018	8.63	8.81	8.47	7.83	0.83
2019	7.95	8.10	8.20	7.66	8.61
2020	8.63	8.37	7.94	4.87	10.57
2021	3.27	0.00	0.67	0.36	6.83
2022	4.98	4.07	1.33	1.42	2.24
2023	5.60	3.91	7.54	2.46	2.50
<b>Rata-Rata</b>	<b>11,73</b>	<b>9,74</b>	<b>7,79</b>	<b>14,47</b>	<b>7,90</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)*

Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan trend yang terus meningkat, meskipun tingkat kenaikannya tidak sama di setiap provinsi. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2013, dengan Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 78,21% dan DKI Jakarta sebesar 43,79%. Kedua provinsi ini memiliki angka rata-rata di atas rata-rata nasional yang berada pada 10,34%, mencerminkan dorongan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah kebutuhan hidup yang tinggi di wilayah padat penduduk dan industri.

Pada tahun 2013-2019, seluruh provinsi secara umum mengalami kenaikan UMP yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan antara 2% hingga 15%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian yang berkelanjutan terhadap

perubahan ekonomi dan inflasi. Namun, pada tahun 2021 terjadi perlambatan kenaikan upah, yang terlihat dari tidak naiknya UMP di Provinsi Banten dan rendahnya kenaikan di provinsi lainnya. Hal ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dan kinerja sektor usaha.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dan 2023, ditandai dengan kenaikan UMP di seluruh provinsi. Papua Barat, yang memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah lain, juga menunjukkan kenaikan UMP yang cukup stabil setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 10,57%, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Secara keseluruhan, kenaikan UMP di lima provinsi ini menunjukkan adanya kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Perkembangan UMP juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan standar hidup yang layak bagi para pekerja.

#### **5.1.4 Perkembangan Inflasi**

Inflasi adalah salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode. Inflasi berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena dapat memengaruhi daya beli, pola konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang stabil mencerminkan kondisi ekonomi yang baik, sedangkan inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, inflasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah (Sukirno, 2014).

Berikut perkembangan tingkat inflasi selama tahun 2013–2023 di lima provinsi tersebut.

Tabel 5.1.4 Perkembangan Tingkat Inflasi di Lima Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

Tahun	Inflasi (Persen)				
	DKI Jakarta	Banten	Kep. Riau	Jawa Barat	Papua Barat
2013	8.00	9.65	8.24	9.15	6.72
2014	2.46	10.20	7.59	7.60	8.36
2015	3.30	4.29	4.40	2.73	3.35
2016	2.37	2.94	3.53	2.75	3.02
2017	3.72	3.98	4.02	3.63	3.61
2018	3.27	3.42	3.47	3.54	3.13
2019	3.23	3.30	2.03	3.21	2.72
2020	1.59	1.45	1.18	2.18	1.68
2021	1.53	1.91	2.26	1.69	2.06
2022	4.21	5.08	5.83	6.04	4.40
2023	2.08	2.04	2.76	2.48	4.40
<b>Rata-rata</b>	<b>3.36</b>	<b>5.02</b>	<b>4.26</b>	<b>4.18</b>	<b>3.86</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tingkat inflasi di lima provinsi menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2013–2023. Secara umum, semua provinsi mengalami kenaikan inflasi pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi, yang berdampak pada naiknya harga barang dan jasa di seluruh wilayah.

Selama periode 2013–2023, tingkat inflasi di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Perbedaan angka inflasi antardaerah mencerminkan beragamnya dinamika ekonomi regional, seperti tingkat konsumsi, distribusi barang dan jasa, serta efisiensi kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah daerah.

Banten mencatat rata-rata inflasi tertinggi, yaitu sebesar 5,02%, yang menunjukkan tekanan harga yang relatif tinggi selama periode tersebut. Angka ini secara konsisten berada di atas rata-rata nasional dan provinsi lainnya, terutama

pada tahun 2013 dan 2014 yang mencatat inflasi sangat tinggi masing-masing sebesar 9,65% dan 10,20%.

Kepulauan Riau mencatat rata-rata inflasi sebesar 4,26%, diikuti Jawa Barat sebesar 4,18%, dan Papua Barat sebesar 3,86%. DKI Jakarta memiliki rata-rata inflasi terendah, yaitu 3,36%, yang menunjukkan pengendalian harga yang relatif lebih stabil, meskipun provinsi ini merupakan pusat konsumsi nasional. Rendahnya inflasi di Jakarta juga mencerminkan efektivitas distribusi barang, efisiensi transportasi, serta pengaruh struktur pasar modern yang lebih dominan.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional selama periode tersebut yang sebesar 4,14%, maka hanya Banten dan Kepulauan Riau yang mencatat rata-rata inflasi di atas nasional. Sementara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua Barat berada di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di sebagian besar provinsi dalam penelitian ini masih dapat dikendalikan, meskipun tetap perlu perhatian dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok, khususnya di provinsi-provinsi dengan daya beli rendah.

### **5.1.5 Perkembangan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam membangun sumber daya manusia. Tingkat pendidikan di suatu daerah menunjukkan kualitas tenaga kerja yang tersedia, yang nantinya akan memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi saat ini, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang utama karena pendidikan memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi dan bersaing di pasar kerja global (Todaro & Smith, 2012). Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka ini, maka semakin baik pula tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Berikut perkembangan Tingkat Pendidikan (rata-rata lama sekolah) tahun 2013-2023.

Tabel 5.1.5 Perkembangan Tingkat Pendidikan (RLS) Lima Provinsi Tahun 2013–2023 (%)

<b>Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>DKI Jakarta</b>	<b>Banten</b>	<b>Kep. Riau</b>	<b>Jawa Barat</b>	<b>Papua Barat</b>
2013	-0.52	-0.59	-0.28	-0.67	-1.13
2014	0.22	0.19	0.02	0.16	0.07
2015	0.05	0.05	0.00	0.08	0.12
2016	0.05	0.07	0.09	0.07	0.09
2017	0.10	0.10	0.13	0.10	0.04
2018	0.04	0.11	0.02	0.07	0.06
2019	0.10	0.10	0.02	0.06	0.03
2020	0.02	0.10	0.03	0.04	0.07
2021	0.04	0.09	0.03	0.05	0.02
2022	0.09	0.10	0.04	0.05	0.04
2023	0.05	0.09	0.05	0.04	0.03
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,022</b>	<b>0,037</b>	<b>0,014</b>	<b>0,005</b>	<b>-0,051</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, (Data Diolah)*

Perkembangan tingkat pendidikan yang diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan di seluruh provinsi yang diteliti. Secara umum, pada tahun 2013-2023, kelima provinsi mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang relatif konsisten.

Selama periode 2013 hingga 2023, perkembangan rata-rata lama sekolah di lima provinsi menunjukkan tren yang bervariasi. Secara umum, semua provinsi mengalami pertumbuhan positif meskipun dengan kecepatan yang sangat kecil. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan lama sekolah berlangsung secara bertahap dan masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Banten mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 0,037 tahun per tahun, disusul oleh DKI Jakarta sebesar 0,022 tahun. Ini menunjukkan bahwa kedua provinsi tersebut memiliki dorongan yang relatif lebih kuat dalam mendorong peningkatan capaian pendidikan penduduknya.

Kepulauan Riau dan Jawa Barat masing-masing mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,014 tahun dan 0,005 tahun, yang menunjukkan perkembangan yang lebih lambat, meskipun tetap berada di jalur positif. Keempat provinsi ini, walaupun angkanya kecil, setidaknya mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan setiap tahun.

Berbeda halnya dengan Papua Barat, yang mencatat rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,051 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi tersebut sempat mengalami penurunan rata-rata lama sekolah di awal periode pengamatan, yang baru mulai membaik setelah tahun 2014. Rendahnya pertumbuhan ini dapat disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur pendidikan serta tantangan geografis di wilayah timur Indonesia.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,017 tahun per tahun, maka Banten dan DKI Jakarta memiliki pertumbuhan di atas nasional, sedangkan Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Papua Barat berada di bawah. Fakta ini memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam perkembangan pendidikan antardaerah masih nyata, dan perlu adanya intervensi khusus dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah luar Jawa.

## **5.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Lima Provinsi**

### **5.2.1 Regresi Data Panel**

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia dan data time series dari tahun 2013 hingga 2023. Total data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 observasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dan sumber resmi lainnya yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software EViews 12 dengan metode regresi data panel.

Untuk melakukan uji regresi data panel, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan model yang tepat bergantung pada asumsi yang digunakan peneliti serta kesesuaian dengan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan model terbaik di antara ketiga pendekatan tersebut. Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji chow untuk menentukan apakah metode Pooled Least Square atau Fixed Effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel dan yang kedua dengan menggunakan Uji Hausman untuk menentukan apakah metode Fixed Effect atau Random Effect yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

## 5.2.2 Pemilihan Model

### 5.2.2.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah metode Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji chow yaitu, jika Prob. Cross section Chi Square  $<$  alpha (5%) maka Fixed Effect Model yang dipilih, atau jika Prob Cross-Section Chi Square  $>$  alpha (5%) maka Common Effect Model yang dipilih.

Tabel 5.2.2.1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.640119	(4,46)	0.0001
Cross-section Chi-square	28.019175	4	0.0000

*Sumber : Hasil olah data eviews 12.*

Berdasarkan hasil uji Chow, diketahui bahwa nilai Probabilitas Cross-section F sebesar 0.0001 dan Probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0000, yang keduanya  $< \alpha$  (5%) berarti nilai p-value  $< (0,05)$ . Dengan demikian, model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

### 5.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji hausman yaitu, jika Prob. Cross-section Random  $< \alpha$  (0,05%) maka Fixed Effect Model yang dipilih, atau jika Prob.Cross-section Random  $> \alpha$  (0,05) maka Random Effect Model yang dipilih.

Tabel 5.2.2.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.560475	4	0.0000

*Sumber : Hasil olah data eviews 12.*

Berdasarkan hasil uji Hausman, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha$  (5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

### 5.2.3 Estimasi Model Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih sesuai dibandingkan dengan Common Effect Model, sementara uji Hausman juga mendukung pemilihan Fixed Effect Model dengan hasil yang signifikan pada probabilitas yang lebih kecil dari  $\alpha$  (5%). Dengan demikian, penggunaan Fixed Effect Model dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan relevan untuk analisis variabel-variabel yang diteliti

Tabel 5.2.1 Estimasi Model Fixed Effect Model

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 04/21/25 Time: 16:10  
 Sample: 2013 2023  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.580234	Mean dependent var	2.041009
Adjusted R-squared	0.507231	S.D. dependent var	0.196549
S.E. of regression	0.137972	Akaike info criterion	-0.974944
Sum squared resid	0.875674	Schwarz criterion	-0.646472
Log likelihood	35.81097	Hannan-Quinn criter.	-0.847921
F-statistic	7.948095	Durbin-Watson stat	1.437773
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : Hasil olah data views 12

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect (Effect Specification: Cross-section fixed), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 6.745180 - 0.045916 X_1 - 0.254679 X_2 - 0.207620 X_3 - 0.024034 X_4 +$$

Keterangan variabel:

- Y = Tingkat Pengangguran
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Tingkat Upah
- X3 = Inflasi
- X4 = Tingkat Pendidikan

#### 5.2.4 Uji Asumsi Klasik

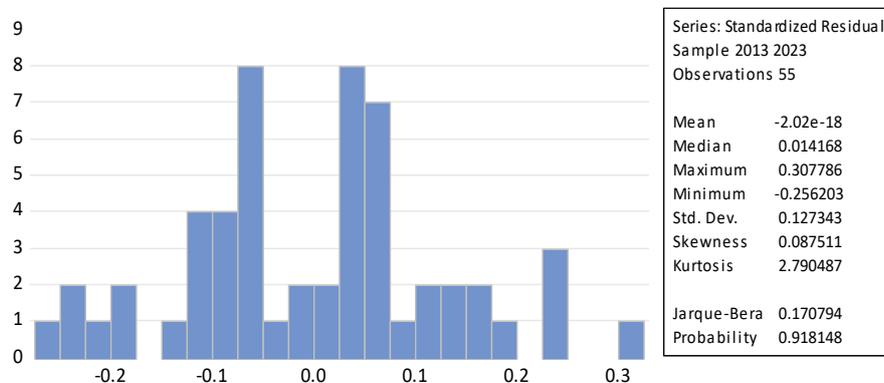
Uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga hasil estimasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Asumsi klasik terdiri dari

beberapa uji yang bertujuan untuk menguji validitas model regresi, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas.

#### 5.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi frekuensi dari data yang diamati apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Untuk menguji suatu data terdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik  $JB\text{-Square} < \text{Chi-Square table}$  maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal begitupun sebaliknya (Gujarati, 2015 : 406).

Tabel 5.2.4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,170794. Jika dibandingkan dengan nilai Chi-Square Tabel pada derajat kebebasan 2 dan tingkat signifikansi 5% yaitu 5,991, maka diperoleh bahwa nilai  $JB < \text{Chi-Square Tabel}$  ( $0,170794 < 5,991$ ). Selain itu, nilai probabilitas sebesar 0,918148 yang lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

#### 5.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik sebenarnya variabel independen tidak terjadi korelasi (Gujarati,2015) (gujarati N damodar, 2015) untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dilakukan uji korelasi antar variabel independen yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.2.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	PERTUMB...	TINGKATUPAH	INFLASI	TINGKATPE...
PERT...	1.000000	0.133001	-0.010895	-0.244998
TINGK...	0.133001	1.000000	-0.546784	0.106153
INFLASI	-0.010895	-0.546784	1.000000	-0.162125
TINGK...	-0.244998	0.106153	-0.162125	1.000000

Sumber : Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Dengan ketentuan *correlation matrix* < 0,8 maka di antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan tingkat pendidikan tidak terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2015: 408) (Gujarati N. Damodar, 2015).

#### 5.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode regresi terhadap nilai absolut residual (ABS(RESID)).

Tabel 5.2.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.157577	Mean dependent var	0.131399
Adjusted R-squared	0.011069	S.D. dependent var	0.096974
S.E. of regression	0.096436	Akaike info criterion	-1.691291
Sum squared resid	0.427797	Schwarz criterion	-1.362818
Log likelihood	55.51050	Hannan-Quinn criter.	-1.564268
F-statistic	1.075553	Durbin-Watson stat	1.856426
Prob(F-statistic)	0.396692		

Sumber: Hasil olah data eviews 12

Berdasarkan hasil olahan, diperoleh nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,396692, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual dengan variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas.

### 5.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis statistik merupakan pengujian terhadap hipotesis statistik yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam menerima atau tidak menerima hipotesis statistik. Jika tidak menerima hipotesis nol atau  $H_0$  maka penelitian yang dilakukan secara statistik keputusannya adalah berpengaruh dan jika tidak menolah hipotesis nol atau  $H_1$  maka keputusan hasil penelitian tersebut secara statistik tidak berpengaruh

#### 5.2.5.1 Hasil Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan signifikan atau tidak dalam menjelaskan variasi dari variabel yang diteliti. Jika nilai probabilitas F lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Hal ini penting untuk menguji kelayakan model sebelum menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial.

Tabel 5.2.5.1 Hasil Uji F

R-squared	0.580234
Adjusted R-squared	0.507231
S.E. of regression	0.137972
Sum squared resid	0.875674
Log likelihood	35.81097
F-statistic	7.948095
Prob(F-statistic)	0.000001

*Sumber: Hasil olah data eviews 12*

Berdasarkan hasil dari regresi fixed effect nilai Probabilitas F-statistic  $0.000001 < 0.05$ . Maka, secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada tingkat signifikansi 5%.

### 5.2.5.2 Hasil Uji t

Uji statistik parsial t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah dalam model regresi. Nilai signifikansi (p-value) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Uji t juga membantu dalam mengevaluasi kekuatan hubungan setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan demikian, uji ini penting untuk mengetahui kontribusi individual dari setiap variabel dalam model.

Tabel 5.2.5.2 Hasil Uji t

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 04/21/25 Time: 16:10  
 Sample: 2013 2023  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.745180	1.129538	5.971625	0.0000
PERTUMBUHANEKONOMI	-0.045916	0.032510	-1.412348	0.1640
TINGKATUPAH	-0.254679	0.072230	-3.525952	0.0009
INFLASI	-0.207620	0.053406	-3.887556	0.0003
TINGKATPENDIDIKAN	-0.024034	0.041332	-0.581492	0.5635

Sumber : Hasil olah data eviews 12

Kriteria uji:

- Jika Prob. < 0,05, maka tolak  $H_0$  (signifikan)
- Jika Prob.  $\geq$  0,05, maka gagal tolak  $H_0$  (tidak signifikan)

Variabel	Probabilitas	Keputusan	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	0.1640	Gagal tolak $H_0$	Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
Tingkat Upah	0.0009	Tolak $H_0$	Berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
Inflasi	0.0003	Tolak $H_0$	Berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
Tingkat Pendidikan	0.5635	Gagal tolak $H_0$	Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada Tabel 5.2.5.2, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6918 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian, perubahan pertumbuhan ekonomi belum mampu menunjukkan pengaruh nyata terhadap kondisi pengangguran di provinsi yang diteliti.
2. Tingkat Upah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0009 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat upah terbukti memengaruhi jumlah pengangguran di provinsi yang diteliti.
3. Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0003 nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat inflasi berhubungan erat dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah yang dianalisis.
4. Tingkat Pendidikan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5635 nilai ini lebih besar dari signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, perubahan tingkat pendidikan belum mampu menurunkan pengangguran di wilayah yang diteliti.

#### **5.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan variasi data. Dengan demikian,  $R^2$  digunakan untuk menilai kualitas model regresi dan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.

Tabel 5.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.580234
Adjusted R-squared	0.507231
S.E. of regression	0.137972
Sum squared resid	0.875674
Log likelihood	35.81097
F-statistic	7.948095
Prob(F-statistic)	0.000001

*Sumber : Hasil data olah eviews 12*

Berdasarkan hasil dari regresi fixed effect nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,5802 yang artinya variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan menjelaskan variabel dependen yaitu pengangguran sebesar 58,02%. Sementara sisanya sebesar 41,98% dijelaskan oleh variabel lain.

### **5.3 Analisis Ekonomi**

#### **5.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Dengan kata lain, kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menurunkan tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan pandangan Okun dalam teori Hukum Okun, yang menyatakan bahwa ketika PDRB meningkat, maka kegiatan produksi juga meningkat dan akan membuka lebih banyak lapangan kerja. (Mankiw, 2012) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga perusahaan akan merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Namun, dalam kenyataan di lima provinsi yang diteliti, pertumbuhan ekonomi belum cukup menurunkan pengangguran. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi di provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tingkat pengangguran di wilayah tersebut tetap tinggi. Salah satu penyebabnya adalah adanya mismatch antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan SDM, serta

pertumbuhan jumlah pencari kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfinatus Suroya, 2022), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Penelitian (Tamala et al., 2023) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak signifikan terhadap pengangguran di enam provinsi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.

### **5.3.2 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran**

Tingkat upah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, semakin tinggi upah, maka tingkat pengangguran cenderung menurun.

Secara teori, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong lebih banyak masyarakat untuk masuk ke dunia kerja. Namun, di sisi lain, apabila kenaikan upah tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menghemat biaya. Dalam hasil penelitian ini, tingkat upah terbukti berpengaruh terhadap pengangguran, yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum yang diterapkan memiliki peran penting dalam menentukan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Arthur Lewis dalam teorinya menjelaskan bahwa di negara berkembang, jumlah tenaga kerja yang melebihi kebutuhan industri formal menyebabkan banyak pekerja menerima upah yang rendah. Oleh karena itu, penetapan upah minimum oleh pemerintah menjadi bentuk intervensi yang diperlukan untuk melindungi pekerja dan meningkatkan pendapatan mereka secara layak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Faizah & Woyanti, 2023) yang menemukan bahwa tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian (Prawira, 2018) juga menunjukkan

bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan memiliki hubungan erat dengan kondisi ketenagakerjaan di berbagai daerah.

### **5.3.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Inflasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, ketika inflasi meningkat dalam jangka pendek, tingkat pengangguran cenderung menurun, ini bisa menunjukkan kondisi di mana inflasi mendorong aktivitas ekonomi.

Secara teori, hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui Kurva Phillips yang menyatakan bahwa ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun karena perusahaan meningkatkan produksi dan memperluas tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, hubungan ini tidak selalu berlaku dalam jangka panjang, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Menurut (Hasibuan, 2023), inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan usaha dan memperluas lapangan kerja, namun inflasi yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan daya beli masyarakat dan membuat biaya produksi meningkat, sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Dalam konteks lima provinsi yang diteliti, hasil menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengangguran, yang kemungkinan besar terjadi karena inflasi dalam periode penelitian masih berada pada batas wajar dan mendorong kegiatan ekonomi.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, inflasi yang berada pada tingkat yang wajar dan dalam jangka pendek justru mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah. Ketika inflasi naik dalam batas yang masih bisa dikendalikan, permintaan terhadap barang-barang produksi meningkat. Hal ini membuat banyak perusahaan memperluas produksinya dan merekrut lebih banyak tenaga kerja, khususnya di sektor tekstil, makanan dan minuman, serta industri rumahan. Hal ini

sejalan dengan hasil penelitian bahwa inflasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Tamala et al., 2023) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian (Hasan & Sasana, 2020) juga menemukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran muda di kawasan ASEAN. Hasil-hasil tersebut memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa inflasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan.

#### **5.3.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran**

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi selama periode 2013–2023. Artinya, tingkat pendidikan belum terbukti signifikan dalam menurunkan pengangguran secara statistik di wilayah dan periode yang diteliti.

Secara teori, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut (Suhendra dan Wicaksono, 2020), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih baik. Pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas, kemampuan beradaptasi, serta kesiapan individu dalam menghadapi persaingan kerja.

Namun, di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, meskipun tingkat pendidikannya sudah relatif tinggi, angka penganggurannya tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendidikan belum tentu langsung menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, atau terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizah dan Woyanti, 2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten. Penelitian (Putra dan Hidayah, 2023) juga menyimpulkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah saja belum cukup untuk menurunkan pengangguran secara signifikan tanpa didukung oleh peningkatan keterampilan dan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan**

##### **5.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi yang diteliti, Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan tidak selalu disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang bersifat padat modal dan berteknologi tinggi, seperti industri ekstraktif dan manufaktur besar, yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Selain itu, adanya mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga menjadi faktor yang menyebabkan pengangguran tetap tinggi meskipun PDRB meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Sari & Wibowo, 2020) yang menemukan bahwa PDRB tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di beberapa wilayah di Indonesia, Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran apabila distribusi manfaat ekonomi tidak merata dan tidak menyentuh sektor tenaga kerja secara luas.

Berdasarkan temuan ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan PDRB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Selain itu, pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha juga perlu ditingkatkan, agar tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang relevan dan lebih mudah terserap di pasar kerja.

### **5.4.2 Tingkat Upah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat upah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi yang diteliti, Arah koefisien yang negatif berarti bahwa semakin tinggi upah minimum, maka tingkat pengangguran cenderung menurun.

Pengaruh negatif ini bisa terjadi karena kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut naik. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksinya dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, upah yang lebih tinggi juga bisa mendorong pekerja informal untuk beralih ke sektor formal yang lebih stabil, sehingga angka pengangguran terbuka menurun.

Hasil penelitian ini sejalan didukung oleh penelitian yang di lakukan (Riyanto, 2020) yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa upah minimum yang terus meningkat, bila diiringi dengan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, dapat membuka peluang kerja yang lebih luas dan menurunkan jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya menetapkan upah minimum setiap tahun, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah daerah dapat mendukung pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sektor-sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum juga perlu diperkuat agar kebijakan ini bisa berdampak langsung terhadap penurunan pengangguran.

### **5.4.3 Inflasi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, ketika inflasi meningkat, angka pengangguran cenderung ikut naik. Hal ini dapat terjadi karena inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi dan Sari, 2021), yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga bahan baku dan barang konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali, terutama pada barang kebutuhan pokok dan biaya produksi. Pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, seperti pengawasan terhadap harga pangan, penguatan cadangan barang, serta pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah daerah juga disarankan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan pelaku distribusi untuk memastikan ketersediaan barang serta memperlancar rantai pasok. Dengan inflasi yang stabil, iklim usaha akan lebih kondusif dan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

#### **5.4.5 Tingkat Pendidikan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, peningkatan rata-rata lama sekolah atau jenjang pendidikan belum mampu secara langsung menurunkan angka pengangguran di wilayah yang diteliti selama periode 2013–2023. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (mismatch), kualitas pendidikan yang belum merata, atau terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Hidayat & Fitriani, 2021), yang menemukan bahwa pendidikan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan pengangguran di beberapa provinsi karena adanya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Dalam kondisi ini, peningkatan

jenjang pendidikan saja tidak cukup untuk menjamin terserapnya lulusan ke dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka jumlah penduduk yang bersekolah, tetapi juga pada perbaikan kualitas dan relevansi pendidikan. Penguatan pendidikan vokasional, program magang industri, serta kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha sangat diperlukan untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, meskipun terjadi peningkatan dalam rata-rata lama sekolah atau jenjang pendidikan, hal tersebut belum mampu menurunkan angka pengangguran secara langsung di lima provinsi yang diteliti selama periode 2013–2023. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena adanya ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, atau karena kualitas pendidikan yang belum merata di berbagai daerah.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Hidayat & Fitriani, 2021) yang menjelaskan bahwa pendidikan belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan pengangguran karena banyak lulusan belum siap masuk ke dunia kerja, baik dari segi keterampilan maupun pengalaman.

Berdasarkan hasil ini, penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tetapi juga memperhatikan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dunia kerja. Pemerintah dapat memperkuat pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kerja sama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan dunia usaha juga penting dilakukan agar lulusan memiliki bekal keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, pengembangan pusat pelatihan kerja dan program reskilling/upskilling bagi angkatan kerja juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital dan industri 4.0.